

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan merdeka belajar adalah kebijakan yang di cetuskan pada era Nadim Makarim dengan mengusung 4 pokok kebijakan besar yakni penghapusan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), penyederhanaan RPP serta perubahan sistem PPD Zonasi, pada garis besarnya filosofi merdeka belajar memiliki landasan humanisme dan konstruktivisme, progresivisme, dan filosofi pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

USBN pada tahun 2020 menjadi yang terakhir diganti menjadi Asesmen atau ujian yang berbentuk tes tulis atau penilaian lain yang lebih komprehensif, penyelenggaraannya juga diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan, begitu juga dalam Ujian Nasional (UN) yang diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang dinilai lebih cocok dengan tujuan pendidikan nasional, pelaksanaannya dilakukan di tengah jenjang sekolah. Dalam momen transisi New Normal penerapan kebijakan ini berpijak pada SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Kesetaraan, serta Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19 guna merelevansikan Merdeka belajar di masa New Normal.

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam arahan kebijakan merdeka belajar, guru bebas dapat memilih, membuat,

menggunakan dan mengembangkan format RPP dan cukup dengan satu lembar yang berisikan 3 komponen inti; tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian. Tentu dalam kondisi New Normal yang mana penyebaran virus covid 19 masih tinggi kebijakan menjadi hadiah bagi para guru karena dapat mengurangi beban guru.

Penerimaan Peserta Didik Baru pada masa Nadiem Makarim di rubah formulanya menjadi empat komposisi yaitu jalur zonasi minimal 50 %, jalur afirmasi minimal 15 %, jalur perpindahan minimal 5 % dan jalur prestasi sisanya 0-30 disesuaikan dengan kondisi daerah, dan daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi. Dalam masa Pandemi perubahan kebijakan ini tidak memberikan dampak yang begitu besar karena PPDB juga dilaksanakan secara online, namun menjadi temuan menarik oleh Muhamammad Wildan bahwa sebagian besar Penyelenggara PPDB tidak menampilkan data pendaftar secara rinci, hanya nama peserta dan jarak dari rumah peserta dan sekolah, tidak ditampilkan alamat peserta Hal tersebut seringkali menimbulkan kecurigaan antar pendaftar maupun masyarakat yang turut mengawasi.

B. SARAN

Berdasarkan penulisan penelitian analisis Kebijakan 4 pokok kebijakan merdeka belajar dan relevansinya pada masa pandemi covid 19 (New Normal), penulis menemukan banyak hal yang dapat dikembangkan lebih luas dari penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat sebuah keterbatasan penelitian yang penulis hadapi diharapkan pada penelitian selanjutnya ada penelitian lain yang dapat menyempurnakan topik ini dengan fokus yang berbed

